

KEPEMIMPINAN PUTRA MAHKOTA TERHADAP RUNTUHNYA DINASTI ABBASIYAH

Mulia Safira

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email: muliasfr@gmail.com

Abstract

The Abbasid dynasty adopted a system of appointing a caliph based on lineage, just like the Umayyah dynasty. This event as inversely proportional to what happened at the time of the prother Muhammad SAW, who appointed the caliph with deliberations among the Muslims. The appointment of a hereditary caliph wa one of the factors for the collapse of Islam during the Abbasid dynasty, due to the occurrance of bloody events and the everthrow of office when the crown prince was elected. As a result of this selfish attitude resulted in bloody event in the struggle for power and the occurrance of civil war so that it became a bad impact for the Abbasid dynasty

Keywords: Power, Caliph, Crown Prince, Abbasid Dynasty

Abstrak

Dinasti Abbasiyah mengadopsi sistem mengangkat khalifah berdasarkan garis keturunan, seperti halnya masa dinasti Umayyah. Peristiwa ini berbanding terbalik terjadi pada masa Rasulullah SAW, yang mengangkat khalifah dengan musyawarah antara kaum Muslimin. Pengangkatan khalifah secara keturunan merupakan salah satu faktor keruntuhan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, karena terjadinya peristiwa berdarah dan penggulingan jabatan saat dipilihnya putra mahkota. Pemilihan putra mahkota diakibatkan karena keinginan khalifah untuk mempertahankan kekuasaannya dan mempertahankan fasilitas pada keluarga khalifah tanpa berpindah tangan kepada khalifah yang lain. Akibat sikap yang mementingkan diri sendiri mengakibatkan peristiwa berdarah dalam memperebutkan kekuasaan dan terjadinya perang saudara sehingga menjadi dampak buruk bagi dinasti Abbasiyah

Kata Kunci: Kekuasaan, Khalifah, Putra Mahkota, Dinasti Abbasiyah,

Diserahkan: 10-12-2022

Diterima: 05-01-2023

Diterbitkan: 25-01-2023

PENDAHULUAN

Sistem pengangkatan khalifah masa dinasti Abbasiyah tidak menggunakan sistem yang pernah dilakukan pada masa Khalifaurrasyidin. Rasulullah SAW, memerintahkan umatnya untuk memilih sosok pemimpin umat Islam dengan memenuhi syarat-syarat pemimpin. Berbeda halnya dengan kepemimpinan pada dinasti Umayyah

dan Abbasiyah yang menerapkan dengan mengangkat putra mahkota menjadi calon khalifah kedepannya sebagai pengganti khalifah di masa itu.

Pengangkatan khalifah pada masa khalifaur Rasyidin dilakukan berdasarkan pada senioritas, kedekatan dengan nabi dan dalam persahabatan dan ketaqwaan, sehingga dapat diperoleh pemimpin yang sesuai kriteria agama. Dan ketika khulafaur Rasyidin mengambil kebijakan apapun mereka akan bermusyawarah (M. Abdul Karim, 2009).

Sistem politik dinasti Abbasiyah masih menerapkan prinsip pemerintahan dinasti Umayyah dengan mengangkat putra mahkota berdasarkan garis keturunan sebagai pengganti kepemimpinan kekhalifahan. Pengangkatan putra mahkota diambil dari putra khalifah dan putra dari saudara khalifah itu sendiri. Pemerintahan Khulafaur Rasyidin dipilih dengan secara demokratis dengan kepemimpinan kharismatik yang demokratis, sementara para penguasa dinasti Umayyah dan Abbasiyah diangkat langsung oleh penguasa sebelumnya dengan menggunakan sistem Monarchi Hereditas yaitu kepemimpinan turun temurun.

Khalifah yang diangkat dari garis keturunan seringkali ditemukan khalifah yang belum cakap dan dibawah umur, yang berpotensi ketergantungan khalifah terhadap pembantunya sangat besar sehingga terjadi pengkhianatan oleh orang-orang kepercayaannya, dan sebagian besar putra mahkota yang diangkat memiliki sifat lemah, dan kurang berwibawa terhadap pemerintahannya, sehingga memunculkan aksi protes dari berbagai pihak terhadap khalifah. Permasalahan yang sering terjadi karena pemilihan pemimpin melalui putra mahkota yaitu munculnya pemimpin yang lemah, dan suka hidup bermewah-mewahan sehingga menyebabkan kekacauan dalam lingkungan masyarakat.

Awal mula peristiwa perebutan kekuasaan terjadi ketika pengangkatan putra mahkota pada dinasti Abbasiyah dilakukan oleh khalifah pertama Abul Abbas As-Saffah, dengan mengangkat Ja'far (saudara Abul Abbas) sebagai putra mahkota untuk menggantinya sebagai khalifah. Setelah kepemimpinan Abu Ja'far, putra mahkota diserahkan kepada Isa bin Musa bin Muhammad bin Ali, Abul Abbas As-Saffah telah melakukan tindakan yang keliru dengan mengangkat putra mahkota yang lebih dari satu orang (Syaiikh Muhammad Al-Khudari, 2016). Khalifah Ja'far menawarkan kepada Isa bin Muhammad agar ia mencabut haknya sebagai putra mahkota dengan catatan dirinya akan menjabat sebagai putra mahkota lagi sesudah Al-Mahdi. Isa bin Musa yang enggan menerima tawaran tersebut dan memaksanya menerima aturan yang tidak disukainya. Beberapa pendapat mengatakan bahwa Abu Ja'far memberikan minuman memabukkan sehingga membuatnya mabuk dan membunuhnya, tetapi Isa bin Musa berhasil sembuh dari sakitnya dan memenuhi permintaan Abu Ja'far.

Hal yang sama juga terjadi pada pemerintahan Al-Amin (putra Harun Ar-Rasyid) yang menjadi khalifah semenjak sepeninggalan Harun Ar-Rasyid, yang ketika itu ketiga putra Harun mendapat wilayah kekuasaan masing-masing yang telah dibagi oleh ayahnya. Sikap dan benih konflik muncul ketika Al-Fadl Ibn Ar-Rabi' (menteri yang menjabat masa Harun dan Al-Amin) meminta Al-Amin untuk mengkhianati

saudaranya Makmun supaya mencopot kekuasaannya di Khurasan. Hal tersebut mempengaruhinya sehingga Al-Amin menghapus semua sumpah dan janji yang telah diucapkan ketika pembaiatan oleh ayahnya dengan menyerahkan kekuasaannya kepada putranya sebagai putra mahkota untuk diangkat menjadi khalifah. Hal tersebut ditolak oleh Al Makmun. Hal tersebut menuai konflik dan perseteruan sehingga Abdullah Al-Amin dibunuh. Konflik pada masa dinasti Abbasiyah yang diawali oleh konflik kedua anak Harun Ar-Rasyid dan konflik ini terus terjadi pada masa kekhalifahan Abbasiyah pada periode selanjutnya (Susmihara, 2013).

Keterkaitan antara kedua peristiwa itu menunjukkan sikap khalifah yang mementingkan diri-sendiri yang sudah dilakukan oleh pendahulunya dan menyebabkan peristiwa berdarah diantara kedua pihak. Aksi perang saudara dilakukan dari kedua belah pihak akibat aksi merebut kursi kekuasaan.

Peristiwa tersebut merupakan stigma negatif mengenai pemilihan calon khalifah secara garis keturunan atau sistem monarki. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya pemilihan khalifah secara monarki tanpa melanjutkan cara Rasulullah dalam memilih pemimpin, dan dampak terpilihnya khalifah secara monarki terhadap kemaslahatan umat.

METODE PENELITIAN

Metodologi pada penelitian ini menggunakan kualitatif dengan kajian pustaka (library research) dengan data yang diambil dari buku, jurnal dan e-book yang berkaitan dengan pengangkatan putra mahkota pada dinasti Abbasiyah yang menjadi polemik salah satu faktor keruntuhan pada bani Abbasiyah. Penulis menganalisis permasalahan mengenai objek yang akan diteliti. Data-data tersebut dikumpulkan dan dideskripsikan dari setiap permasalahan yang terjadi dalam uraian narasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengangkatan Putra Mahkota

Kepemimpinan yang dilakukan secara turun-temurun sesuai garis keturunan sudah dilakukan sebelum Islam datang. Semenjak Islam datang, sistem kepemimpinan secara kekhalifahan dilakukan saat Bani Umayyah menjabat sebagai khalifah. Pemerintahan yang bersifat kekuasaan foedal dan turun-temurun, hanya untuk mempertahankan kekuasaan, adanya otoriter, kekuasaan mutlak, kekerasan, diplomasi yang dibumbui dengan tipu daya, dan hilangnya keteladanan nabi untuk bermusyawarah dalam menentukan pemimpin merupakan gambaran umum tentang kekuasaan dinasti sesudah Khulafaur Rasyidin.

Kehidupan khalifah pada masa dinasti cenderung dipandang dengan hidup bermewah-mewahan, sehingga tidak disukai oleh para ulama di kala itu. Sedangkan pada masa khulafaur Rasyidin menjadi khalifah yang hidup dengan sederhana jauh dari sikap bermewah-mewahan, dan jauh dari sikap untuk memanfaatkan kekayaan negara/Baitul Mal untuk kepentingan individu dan keluarga. Kekayaan negara digunakan untuk berbagai kemaslahatan umat.

Pengangkatan khalifah secara tidak jelas pada masa dinasti Abbasiyah mengakibatkan kelemahan dalam kepemimpinan negara dan menjadi salah satu faktor internal menjadi sebab runtuhnya dinasti Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena pemimpin yang tidak mempunyai kriteria dan kualitas yang jelas seperti: *siddiq*, amanah, *tabligh*, *fatanah*, *bertaqwa*, adil, musyawarah, bertanggung jawab dalam suri teladan sebagai kriteria kepemimpinan dalam Islam (Ahmad Fananie & Nanang Mulyana, 2022).

Pengangkatan putra mahkota dalam dinasti Abbasiyah tidak terlepas dari peran khalifah yang mengutamakan agar putranya menjadi penerus dalam memegang kendali kekuasaan, tanpa keterlibatan orang lain dalam menjalankan kekuasaan. Hal ini menjadi beberapa kesalahan besar dalam sistem monarki yang mengangkat putranya yang belum balig menjadi putra mahkota. Perdebatan dalam pengangkatan putra mahkota yang belum balig diakibatkan karena belum mengetahui akan kelebihan dan kekurangan dalam pengangkatan putra mahkota yang belum balig.

Tolak ukur terhadap kepemimpinan secara garis keturunan cenderung memiliki banyak nilai negatif terhadap proses pengangkatan putra mahkota dan kepemimpinan di masyarakat, tetapi ditemukan hal positif mengenai setiap peristiwa, yaitu tidak adanya pemberontakan pihak dari luar karena tidak menerima khalifah baru, siapapun khalifah baru dalam dinasti Abbasiyah, rakyat harus menaati setiap keputusan dari khalifah.

2. Perintah Nabi Muhammad Dalam Mengangkat Pemimpin

Pelaksanaan sistem monarki ada yang ditentang oleh rakyatnya sendiri. Tetapi keberhasilan dinasti Umayyah yang dipimpin oleh 14 khalifah terhadap perluasan wilayah Islam, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kemajuan bidang arsitek dan lain-lain. Sistem monarki ini terus dilakukan oleh Umayyah yang kemudian diikuti oleh dinasti Abbasiyah dalam melihat pencapaian dinasti Umayyah (Fahsin M. Fa'al, 2008).

Model pemilihan pada masa Khalifaur Rasyidin memungkinkan tampuk pimpinan seorang khalifah akan berpindah tangan kepada pihak yang bukan keturunan/keluarga khalifah, hal ini yang dikhawatirkan oleh dinasti Umayyah dan Abbasiyah dengan tidak lagi menjadi khalifah, maka kekuasaan dan fasilitas pada keluarga khalifah akan berpindah tangan kepada khalifah yang baru. Rasulullah tidak melarang pemilihan khalifah dengan cara dengan mengangkat putra mahkota dengan sistem keturunan. Hal yang diperintah oleh nabi untuk memilih pemimpin yang memenuhi kriteria pemimpin.

Menurut Imam Al-Mawardi dalam Kitab *Al-Ahkam Ash-Shulthaniyah* menyebutkan syarat-syarat pemimpin, diantaranya: adil, berilmu, sehat jasmani, normal (tidak cacat), bijak, dan keberanian.

Proses pemilihan yang tidak berdasarkan pada kualitas calon pemimpin mempunyai resiko dalam mendapatkan pemimpin yang otoriter, terjadi penyalahgunaan wewenang, pengabaian terhadap hukum, dan dapat terbentuk yang disebut dengan kerajaan, yaitu pemerintahan yang bersifat yang berdasarkan kepentingan dan kekuasaan pribadi anggota kerajaan. Jenis pemerintahan yang dikenal saat dengan pemerintahan otoriter, individualis, otoraksi. Terkait dengan pemimpin, hendaknya

pemimpin/ khalifah tidak memusatkan perhatian pada kekuatan individual, bukan pada posisi atau status yang ia miliki (Max Weber, 1966).

3. Peristiwa Berdarah

Perebutan kekuasaan dengan sistem monarki sering terjadi saat pergantian kekhalfahan dan pengangkatan putra mahkota di dalam keluarga khalifah itu sendiri. Hal tersebut muncul karena ada pihak yang tidak mendapat jatah kursi kekhalfahan dan ketidakcocokan khalifah tersebut dalam memerintah di wilayah tersebut. Salah satu kesalahan yang dilakukan pada masa dinasti Abbasiyah yaitu khalifah mengangkat lebih dari satu putra mahkota dalam waktu kepemimpinannya. Kebijakan yang menjadi sumber bencana dan petaka yang akan terjadi akibatnya, tetapi mereka masih meniru model pemilihan yang diterakan oleh para pendahulu, maka pada dasarnya mereka menceburkan diri pada keburukan dan kehancuran itu sendiri.

Tetapi khalifah sesudahnya tidak mengambil pelajaran dan peristiwa terdahulu. Peristiwa pengangkatan putra mahkota yang lebih dari seringkali menimbulkan kekacauan dalam sistem kekuasaan, terlebih khalifah sering kali menggunakan cara untuk menurunkan putra mahkota dari anak saudaranya dengan tujuan agar anak khalifah dapat meneruskan pemerintahan kekhalfahannya. Tetapi dengan karakter penguasa yang mementingkan diri-sendiri, sehingga menghapus semua sumpah dan janji yang terpatrit dalam jiwa sebagaimana yang terjadi pada para pendahulunya. Penguasa lebih mengutamakan mendahulukan putranya sebagai putra mahkota dan mengalahkan saudaranya.

Peristiwa berdarah yang terjadi pada dinasti Abbasiyah yaitu perang saudara antara Khalifah Al-Amin dan Al-Makmun yang diakibatkan karena kesalahan khalifah AL-Amin yang melanggar sumpahnya dengan mencabut kekuasaan saudaranya Al-Qasim di Semenanjung Jazirah Arab dan mengangkat putranya menjadi khalifah sebagai pengganti dirinya, hal ini menimbulkan pertentangan dari AL-Makmun dan menasehatinya. Inilah awal konflik keduanya, pada dasarnya AL-Amin melakukan ini karena ketakutannya akan adanya pesaing yang dihadapinya dalam tampuk pemerintahan (Perpustakaan Nasional RI, 2003). Peristiwa menegang antara Al-Amin dan Al-Makmun menyebabkan Al-Amin terbunuh. Sepeninggalnya Al-Amin, kekhalfahan Abbasiyah dipimpin oleh Al-Makmun, yang mengalami pemberontakan dari berbagai pihak, hal ini terjadi karena dampak negatif karena perang saudara antara Al-Amin dan Al-Makmun. Berikut dampak konflik antara Al-Amin dan Al-Makmun terhadap pemerintahan dinasti Abbasiyah, yaitu:

1. Tragedi pemberontakan dari berbagai wilayah
2. Turunnya pendapatan pemerintahan
3. Menurunnya kepercayaan pemerintahan Abbasiyah

Pada masa Al-Amin anggaran negara dipakai untuk menyewa wanita penghibur padahal sebelumnya anggaran itu digunakan untuk kemaslahatan masyarakat bukan untuk berfoya-foya, sehingga masyarakat tidak percaya dengan pemerintahan pada masa sesudah Harun Ar-Rasyid (Imam As-Suyuthi, 2014).

Dan perebutan kekuasaan masih terjadi pada beberapa khalifah kedepannya setelah kepemimpinan Al-Makmun.

KESIMPULAN

Pengangkatan khalifah dengan sistem pengangkatan beberapa putra mahkota merupakan suatu kesalahan besar terhadap kepemimpinan dinasti Abbasiyah yang mengadopsi sistem Dinasti Umayyah. Konflik yang terjadi akibat pengangkatan putra mahkota yang lebih dari satu merupakan perebutan kekuasaan dan melanggar perjanjian terhadap peralihan kekuasaan kepada khalifah selanjutnya.

Perebutan kekuasaan karena khalifah lebih mementingkan kepemimpinan kekhalifahan berada di tangan keluarganya sendiri, tanpa memikirkan akibat yang terjadi kedepan. Peristiwa yang sudah terulang terjadi di masa lampau tetapi tetap terjadi lagi di masa depannya, sehingga peristiwa ini menjadi salah satu faktor keruntuhan dinasti Abbasiyah, dan terjadi perang saudara yang berujung dengan pertumpahan darah.

Sosok putra mahkota yang dipilih menjadi khalifah yang memimpin wilayah dan pemerintahan Islam. Beberapa putra mahkota yang dipilih tidak memenuhi kriteria pemimpin yang pernah diperintah oleh Rasulullah SAW, diantaranya ditemukan sifat dengan kehidupan khalifah yang bermewah-mewahan, memiliki sikap yang kurang tegas dan lemah sehingga muncul banyak kekacauan dan pertentangan dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khudari, Syaikh Muhammad. 2016. *Bangkit dan Runtuhnya Daulah Abbasiyah Cet. I* Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar
- Imam As-Suyuthi, Imam. 2014. *Tarikh Al-Khilafah*, Terjemahan Muhammad Ali Nurdin. Jakarta: Qisth Press
- Fa'al, Fahsin M. 2008. *Sejarah Kekuasaan Islam*. Jakarta: Artha Rivera
- Karim, M. Abdul. 2009. *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher
- Perpustakaan Nasional RI. 2003. *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, Cet. Ke.II*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Susmihara. 2013. *Sejarah Peradaban Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Weber, Max. 1966. *The Theory Of Social And Economic Organization Translate By Talcott Parson*. New York: The Free Press
- Ahmad Fananie& Nanang Mulyana, *Refleksi Dinasti Umayyah dan Abbasiyah*, an-nufus:vol.3,no.2, diakses pada 8 desember 2022, pukul 07.20.
<http://qnoyzone.blogdetik.com/index.php/2008/08/01/deteksi-syarat-syarat-pemimpin-islami/>

First publication right:

[Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia](#)

This article is licensed under:

